

BAB III

DEMOKRASI : TINJAUAN UMUM

Selama beberapa waktu sesudah Perang Dunia II, berlangsung perdebatan antara penganut aliran klasik yang berkeras mendefinisikan demokrasi berdasarkan sumber atau tujuan dengan para teoretikus penganut konsep demokrasi ala Schumpeter berdasarkan prosedur yang jumlahnya semakin banyak. Pada tahun 1970-an perdebatan itu berakhir, dan Schumpeter keluar sebagai pemenang.

Perkembangan bangsa Indonesia pada masa orde baru telah meletakkan bangunan yang cukup kuat pada aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kesemuannya adalah dalam rangka untuk menuju proses demokratisasi. Perubahan kearah tatanan yang lebih baik, yang tercermin didalamnya kebersamaan, sikap egaliter, adil, itulah sebetulnya esensi dari demokrasi.

Menjadi penting bagi negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, proses penghayatan demokrasi sesungguhnya merupakan suatu langkah yang penting agar tidak terombang-ambing oleh berbagai pengaruh negatif yang datang dari luar, apalagi menghadapi kondisi dunia Internasional atau menghadapi liberalisasi ekonomi, dengan ditambah suasana krisis yang melilit bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan hal kita melihat letak urgensitas dan signifikansinya untuk membicarakan demokrasi.

A. PENGERTIAN DEMOKRASI

Kata demokrasi bukanlah barang baru, sering terdengar ditelinga kita. Hampir sebagian besar masyarakat mengetahui, meskipun dalam tataran memahami dan menghayati masih patut untuk dipertanyakan. Sehingga untuk berbicara mengenai pengertian demokrasi sesungguhnya tidak lagi kaget atau gagap.

Namun demikian, Giovanni Sartori menganjurkan sebelum lebih jauh mengupas atau mendalami makna dari demokrasi, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui secara etimologis. Didalam bukunya Giovanni mengatakan :

" Whenever we ask : What is it? the first answer that comes to minds is an explanation of the word that "it" stands for. In the case of democracy, the most common way of defining is to go back to the word's etymological democracy, and in this case our definition will be : democracy is the rule of the people. However, to inquire about the original, literal meaning of a term is only the first step of an inquiry. If it ended there it would and to soon. And since most people with clear and assured ideas about democracy usually derive them from etymology, it will be useful to show that from the premise, democracy is the power of the people. We cannot draw definite orang useful conclusions.¹

("Kapanpun saja kita bertanya: Apakah (demokrasi) itu?. Dari jawaban pertama yang muncul dibenak kita adalah kejelasan dari akar kata tersebut. Cara yang paling umum untuk mendefinisikannya adalah kembali dari makna kata etimologi. Inilah yang saya katakan sebagai kata demokrasi menurut etimologi, dan dalam masalah ini definisi kita akan menjadi: demokrasi adalah aturan bagi rakyat. Betapapun demikian untuk menyelidiki tentang keasliannya, makna harfiah dari term ini adalah sekedar tahapan awal dari penyelidikan selanjutnya. Jika makna harfiah berakhir disitu, maka itulah maknanya. Dan sejak masyarakat hampir mendapatkan kejelasan dan percaya pada gagasan demokrasi biasanya mereka itu memperolehnya dari etimologi terlebih dahulu, dan itu sangat berguna sekali untuk memperoleh kejelasan, demokrasi adalah merupakan kekuatan bagi rakyat. Kita tidak dapat menarik atau menggunakan kesimpulan.")

¹. Giovanni Sartori, *Democratic Theory*, Detroit : Wayne State University Press, Cet. II, 1962, hal.17

Oleh karena itu kita mempunyai dasar untuk mengatakan bahwa pengertian demokrasi yang bersumber pada pengertian harfiah, yakni pemerintah rakyat. Ini berasal dari bahasa Yunani "demos" dan "kratia". Demos berarti rakyat dan kratia berarti pemerintahan. Jadi "demokratia" (demokrasi) artinya "pemerintahan rakyat".

Hampir semua sumber yang menulis tentang demokrasi mengungkapkan pengertian sama seperti yang ada dalam ensiklopedia populer politik pembangunan Pancasila yang dikutip M. Taopan :

"Arti demokrasi (Umum) : Istilah demokrasi berasal dari dua kata Yunani : yaitu "demos" artinya rakyat, dan "kratis" yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi, adalah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat atau pemerintahan oleh mereka yang diperintah. Jadi demokrasi adalah suatu pola pemerintan dalam mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau, Demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.²

Berbeda dengan Scumpeter, mengatakan demokrasi adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan yang kompetitif dalam rangka untuk memperoleh suara rakyat.

². M. Taopan, *Demokrasi Pancasila, Analisis konsep Aplikatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hal. 21

Pengertian diatas disempurnakan lagi oleh Sudarsono yang mengandung demokrasi tidak sebatas dari kacamata politik atau sebuah pemerintahan, tapi juga dari pandangan filosofis yang dapat dijadikan sebagai pandangan hidup yang mendasar bagi suatu bangsa.

Prinsip dasar yang harus menjadi pusat orientasi dalam pelaksanaan demokrasi: pertama kekuasaan yang dipegang oleh negara berasal dan bersumber dari keinginan rakyat. Kedua, penyelenggara negara seyogyanya menyadari bahwa keberadaanya hanyalah sekedar mewakili (representasi).Ketiga, keikutsertaan rakyat secara keseluruhan dalam menyelenggarakan negara baik secara langsung atau tidak langsung sesungguhnya merupakan modal utama bagi keberhasilan pelaksanaan kekuasaan negara.

Dari kesemua prinsip diatas, prinsip ketiga sebagai pengembangan arti demokrasi seringkali dipahami pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Sri Soemantri dengan mengutip Declaration of Independence, juga sependapat dengan pengertian tersebut sebagaimana terungkap di bawah ini :

"..... Ditinjau dari sudut etimologi, demokrasi berasal dari perkataan "denos" (rakyat) dan cratein (memerintah)."

"Dengan demikian maka demokrasi itu berarti: Pemerintahan oleh rakyat, yang dalam perkembangan selanjutnya, seperti kita lihat didalam Declaration of Independence; adalah power for the people and by people." ³

Kalau demokrasi difahami sebagai "pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat", maka pemahaman demokrasi semacam ini harus dikonotasikan dengan

³. M. Taopan. *Op cit*, hal. 23

persamaan hak dan kewajiban, persamaan kedudukan, harkat martabat manusia tanpa memandang keturunan, kulit, status sosial, jenis kelamin, ras, agama, dan lain-lain. Untuk itulah sumber lain terutama hasil karya ilmuan memandang demokrasi itu tidak hanya sebatas keterwakilan, tetapi juga persamaan jumlah yang bisa dirasakan bersama-sama.

Jadi demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Meskipun demikian, masih banyak dari beberapa pemikir yang masih menyangsikan akan adanya keadilan dalam cakupan pengertian demokrasi, hal ini didasarkan asumsi bahwa kadang-kadang kehendak dari komunitas justru menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang justru mengaburkan tujuan yang dikehendaki oleh demokrasi itu sendiri.

Para pemikir yang ingin memahami pengertian demokrasi dengan kerangka berfikir semacam ini tentu saja akan lebih membantu kita dalam mengamati kehidupan demokrasi secara senyatanya dalam sebuah negara atau membandingkannya dengan negara-negara yang lain. Oleh karena itu, kendati dari berbagai pengertian sebagaimana terlihat di awal-awal bahasan rakyat diletakkan pada posisi sentral "rakyat berkuasa", tetapi dalam prakteknya oleh UNESCO disimpulkan bahwa ide demokrasi itu dianggap "ambiguous", sekurang-kurangnya ada ambiguity mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historik yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktek demokrasi.

Meski demikian yang perlu kita tekankan dalam bab ini adalah seperti yang banyak disebutkan oleh para pemikir, bahwa demokrasi sebagaimana keterbukaan adalah "cara" bukan "tujuan". Jadi demokrasi pun harus kita pandang sebagai cara untuk mencapai tujuan itu sendiri. Karena dalam demokrasi yang esensial adalah proses, maka beberapa ahli seperti Nurcholish Madjid berpendapat bahwa demokrasi bukanlah suatu nilai statis yang tak disuatu tempat didepan kita, lalu kita bergerak menuju kesana untuk mencapainya. Bagi Cak Nur, demokrasi adalah suatu nilai yang dinamis, karena nilai esensinya adalah proses kearah lebih maju dan lebih baik dibanding dengan yang sudah dialami oleh suatu masyarakat atau negara. Oleh karena itu sampailah beliau mengambil kesimpulan bahwa pengertian demokrasi adalah identik dengan demokratisasi.⁴

Hanya saja pengertian demokrasi sebagaimana dituturkan Cak Nur diatas ditentang oleh Afan Gaffar. Dalam kesempatan memberikan pengantar sebuah buku ia menuturkan bahwa demokratisasi merupakan proses untuk menuju demokrasi;

"Hanya saja saya kurang sependapat dengan Nurcholish Madjid yang menyatakan bahwa demokrasi dan demokratisasi adalah dua hal yang sama. Menurut saya antara keduanya jelas merupakan dua hal yang berbeda, demokratisasi merupakan proses menuju demokrasi."⁵

Sebenarnya dari dua pendapat diatas kalau kita kaji lebih dalam tidak terjadi perbedaan atau kontradiksi, karena secara esensi dari apa yang menjadi

⁴. Nurcholish Madjid, *Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia*, dalam Elza Peldi Taher, (ed.) hal. 203

⁵. Afan Gaffar, *Demokrasi dan Prospeknya di Indonesia*, dalam Elza Peldi Taher, (ed.) hal. xxii

kajian kedua pendapat tersebut adalah sama yaitu: bahwa dalam suatu masyarakat atau negara terhadap proses yang terus menerus, secara dinamis, dalam gerak perkembangan dan pertumbuhan kearah yang lebih baik. Jadi perbedaan tersebut hanya terletak pada penyebutan saja, sedang apa yang mereka maksud adalah sama

Dari keseluruhan pendapat yang telah kita tampilkan diatas baik pengertian demokrasi dari segi etimologi maupun pengertian dari segi istilah, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengertian demokrasi adalah, "Suatu filsafat atau sistem sosial yang mana dari padanya menekankan adanya peran serta aktif, saling menguntungkan, dan adanya kewenangan untuk mengawasi masalah dalam masyarakat.

B. KAIDAH-KAIDAH DEMOKRASI

Dalam kesempatan ini kita akan mengulas tentang kaidah-kaidah demokrasi sebagai teori tentang hak, yang masing-masing akan terkait dengan substansi demokrasi. Kaidah-kaidah yang dibicarakan adalah: Ta'arruf (saling mengenal), Syura (musyawarah), Ta'aawun (kerja sama), Mashlahah (menguntungkan masyarakat), dan 'adl (adil).⁶

⁶. Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam*, Mizan, Bandung, 1997, hal. 91

B.1 Ta'arruf atau Saling Mengenal

Dalam Surat Hujurat:13 disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ الَّذِي إِذْنَهُ يُؤْتِيهِمُ الْحَيَاةَ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٣)

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu".

Dari ayat ini setidaknya ada dua hal yang adapat ditarik. Pertama, pada mulanya manusia itu satu, yang menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ialah Tuhan, dan yang mengukur kemuliaan ialah Tuhan. Jadi ada lingkaran yang berawal dan berakhir pada Tuhan, *teosentrisme*. Kedua, manusia secara obyektif memang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Manusia itu secara ontologis merupakan makhluk sosial, sehingga mereka berkelompok dalam bangsa dan suku.

Pengelompokkan atau solidaritas dipandang oleh agama sebagai fithrah, sunnatullah yang tak akan berubah (*la tabdila likalimatillah*), Qs. Yunus:10:64. Disebutkan tujuan dari pengelompokkan itu ialah ta'arruf, saling mengenal. Ta'arruf berasal dari kata 'arafa yang berarti mengerti. Ada ungkapan bahasa Perancis *tout comprendre tout pardonner*, mengerti berarti memaafkan. Orang diharapkan untuk mengerti kepentingan orang lain, sehingga dapat menenggang. Itulah prinsip resiprositas yang terjadi, saling mengerti kepentingan orang lain. Dalam suatu masyarakat demokratis semua orang harus mengerti kepentingan,

baik horional maupun vertikal orang lain, sehingga hak-hak orang lain tidak dilanggar.

Ta'arruf hanya berjalan kalau ada *equality* atau persamaan. Tidak ada warga negara yang dinomorduakan. Dengan persamaan sejarah, persamaan hukum, persamaan hak dan kewajiban, tidak relevan lagi membicarakan perbedaan penduduk Muslim dan non-muslim. Ta'arruf mempunyai asumsi adanya liberty, kemerdekaan. Dalam masyarakat aman dulu di Indonesia yang terdiri dari wong agung (orang besar), dan wong cilik (orang kecil) dari masa feodalisme. Ta'arruf juga berarti adanya komunikasi dialogis. Tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Semua hal diselenggarakan berdasar kepentingan pihak-pihak terkait, tidak monologis oleh kelompok mayoritas yang dominan.

Ta'arruf mempunyai asumsi negara hukum. hukum positif yang diketahui bersama mencegah pandangan tentang relativitas nilai-nilai. Kelompok -kelompok sosial dengan latar belakang sejarah,kepentingan dan tujuan berbeda menyebabkan perbedaan pandangan. Sumber relativitas nilai itu dihilangkan oleh pandangan yang sama yang dicerminkan dalam hukum positif yang secara obyektif mengikat seluruh warga.

B.2. Syura atau Musyawarah

Musyawah diwajibkan dalam Islam, karena itu bagi umat Islam komitmennya pada demokrasi sangat kuat. Di dalam surat Asy-Syura:38

dikatakan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ أَمْرَهُمْ شُورَى
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (الشورى : ٣٨)

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari reeki yang Kami berikan kepada mereka"

Kalau dalam ayat di atas musyawarah dikerjakan dengan orang-orang Islam, maka dalam Ali Imran:159 dibawah ini musyawarah juga diharuskan kepada musuh-musuh Islam:

وَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (ال عمران: ١٥٩)

"Maka disebabkan karena rahmat Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (peperangan) itu".

Demokrasi yang kita kenal di Indonesia adalah produk dunia modern, dan bukan hasil yang lurus dari evolusi sejarah. Sejarah Islam sendiri adalah sejarah yang terputus dari segi waktu, karena ada yang berpendapat bahwa sesudah Nabi dan Khulafaur-Rasyidin tidak ada lagi sejarah Islam, tetapi yang ada adalah sejarah kerajaan Islam.

Demikian juga halnya sejarah Islam di Indonesia, juga terputus oleh kolonialisme, dan secara geografis, sosial, dan budaya dari sumbernya. Di Aceh ada musyawarah untuk menentukan raja dan orang kaya, di Minangkabau ada musyawarah untuk menentukan raja, di Jawa konon ada tradisi pepe. Khusus Jawa, tradisi pepe sama sekali bukanlah musyawarah melainkan protes. Itupun sangat jarang dilakukan. Maka, untuk Indonesia mencari akar musyawarah

tidaklah mungkin di tingkat kerajaan tapi di tingkat desa, tidak dikalangan priyayi tapi di lingkungan wong cilik.⁷

B.3. Ta'awun atau Kerja sama

Biasanya orang berbicara tentang demokrasi dalam pengertian demokrasi politik, yaitu tidak adanya hambatan dari kekuasaan. Demokrasi yang dimengerti secara negatif, berarti "merdeka dari". Islam menginginkan pengertian yang lebih dari itu, demokrasi perlu diperluas menjadi kerja sama antar warga, yang berarti "merdeka untuk", yaitu demokrasi sosial dan ekonomi.

Bahwa bangsa Indonesia adalah satuan yang secara obyektif ada, merupakan self evident truth yang tak terbantah. Tetapi, itu tidak berarti bahwa satuan yang besar lebih penting dari satuan yang kecil, karena keduanya adalah satuan-satuan yang obyektif. Yang mementingkan masyarakat adalah sosialisme (ekonomi terpusat, perencanaan sentral, dan intervensi negara), sedangkan yang mementingkan individu adalah kapitalisme (ekonomi pasar bebas).

Kita berhak khawatir dengan perkembangan konsep ta'awun secara nasional belum selesai, kita akan meghadapi tatanan baru yang bersifat internasional. Persoalan yang kita hadapi bersama ialah berlomba dengan waktu. Sebelum tatanan internasional itu berlaku pada tahun 2020, ta'awun nasional harus selesai. Runtuhnya komunisme di Eropa Timur yang tidak berarti bahwa cita-cita sosialisme runtuh, seolah-olah memberi kesempatan bagi sistem kapitalisme untuk berkembang dan bukan tidak mungkin menghegemoni. Hal ini juga memberi kesempatan dan tantangan baru bagi sistem sosial yang berjalan sesuai

⁷. Kuntowijoyo, *Op. cit.* hal. 104

dengan jalan demokrasi, tapi tidak merupakan masyarakat ta'awun. Pancasila mempunyai potensi sebagai sistem alternatif. Ta'awun nasional hanya dapat berjalan jika kita dapat menghilangkan dualisme ekonomi, monopoli, oligopoli, nepotisme, dan ersatz capitalism, serta mempunyai pemerintahan yang bersih (tanpa korupsi dan kolusi). Syarat pertama kearah itu ialah adanya syura yang aktif melakukan control terhadap kekuasaan.⁸

B.4. Mashlahah atau Menguntungkan Masyarakat

Mashlahah sama akarnya dengan kata shalih yang berarti baik menurut agama. Shalih atau saleh dapat berarti kebaikan pada umumnya, menguntungkan. Di sinilah orang sering berbicara agama sebagai moral force dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang biasanya akan berbicara tentang amarma'ruf nahi munkar bila menyinggung peranan agama. Agama dapat berperan sebagai moral force supaya orang berbuat baik. Peran agama tidak langsung, tetapi melalui individu atau kebudayaan. Kesalahan orang beragama ialah memandang politik itu masalah sederhana, asal semua orang berbuat baik.

Mashlahah sering tertumbuk pada faktor sosial budaya. Kita sudah menggantikan konsep kekuasaan berdasar Asthabrata, yaitu seluruh kebaikan dipegang pihak berkuasa, dengan konsep ala Semar, yakni penguasa hanya tut wuri handayani. Namun kika masih menemukan penguasa yang otoriter di satu pihak, dan masyarakat yang submissive di pihak lain. Juga ada anggota masyarakat yang dengan kekayaannya dapat membeli demokrasi, dan masyarakat

⁸. *Muhanamad A.S. Hikam, Negara dan Masyarakat Sipil, Prisma, 1991, hal. 78*

yang bersedia menjual suaranya. Mereka yang menjual suara tidak menyadari bahwa sekaligus juga terjual kemungkinan untuk mendapat masalah. Akibatnya, masalah hanya milik elite penguasa atau mereka yang kaya.

B. 5. 'Adl atau Adil

Islam mengharuskan keadilan secara mutlak. Dalam Surat An-Nisa':58

tentang keadilan Tuhan menyatakan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنِيَّةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء : ٥٨)

"Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".

Nabi mengatakan: "Seandainya Fatimah mencuri pasti kupotong tangannya." Tuntutan untuk berlaku adil dalam Islam, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehubungan dengan demokrasi, kami akan mengemukakan dua macam keadilan yaitu *distributive justice* dan *productive justice*, yang masing-masing menjadi dasar demokrasi Sosial dan demokrasi Ekonomi.

Dalam masyarakat industrial, asumsinya adalah bahwa seluruh warga negara pernah, sedang, dan akan terlibat dalam produksi masyarakat. Mereka semua berhak mendapat santunan. Negara sebagai pemilik kerja masyarakat, wajib memberi santunan pada seluruh warga negara yang terlibat dalam proses produksi. Dengan demikian kita sampai pada kesimpulan perlunya *distributive justice*, keadilan distributif dimana semua yang terlibat dalam proses produksi berhak atas hasil kerjanya. Dalam masyarakat industrial kerja telah mengalami sosialisasi. Tidak seorang pun dapat bekerja sendirian, tetapi harus bersama-sama dengan masyarakat. Modal organisasi, dan tenaga kerja hanyalah faktor-faktor

dalam produksi, karena itu tidak layak bagi pemilik modal mengkaliam sebagai satu-satunya satuan yang mempunyai hak atas nilai produksi. Dengan logika itu, sampailah kita pada *productive justise*, di mana semua yang terlibat dalam proses prouksi berhak atas jumlah tertentu dari aset-aset produksi. *Productive justise* mengandaikan bahwa ada pemilikan kolektif atas aset-aset itu melalui jangka waktu tertentu yang akan diatur secara demokratis.⁹

Beda pada *distributive justise* dan *productive justise* ialah pelaku, bentuk, dan penerima. *Disttributive justise* pelakunya adalah negara, bentuknya bermacam-macam jaminan, dan penerimanya adalah semua warga negara dengan kategori tertentu. *productive justise* pelakunya adalah perusahaan, bentuknya pembagian pemilikan kekayaan perusahaan, dan penerimanya karyawan di perusahaaan yang bersangkutan. Mana yang perlu diprioritaskan supaya ada keadilan? Keadilan distributif atau keadilan produktif?. Biasanya, transisi masyarakat itu akan lebih mendahulukan keadilan distributif, sebab keadilan itu dapat dicapai dalam sistem kapitalis. Kalau keadilan sosial menurut Pancasila bukanlah kapialisme dan bukan pula sosialisme, maka keadilan produktif menjadi tujuan akhir dari proses Pancasilaanisasi. Demokratisasi distributif dan produktif itu tidak mengganggu efisiensi dan kompetisi dalam tatanan baru internasional, kalau malah tidak menguntungkan.

Menurut kami, penghapusan dualisme ekonomi merupakan prasarat yang tak boleh di tawar bagi keadilan sosial. Institusi kolonial yang inhuman itu akan menghantui setiap kali kita akan mengadakan transformasi.

⁹. Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993, hal. 89

C. SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

C.1. Tabiat persekutuan dalam masyarakat tradisional

Menurut para ahli, corak atau tipe demokrasi bagi tiap-tiap negara sangat ditentukan oleh perkembangan sejarah dan unsur-unsur kemasyarakatan, yang merupakan potensi atau kemampuan negara masing-masing. Demikian juga prinsip hidup bernegara seperti terumuskan dalam Pancasila (termasuk prinsip kerakyatan atau demokrasinya) sebenarnya juga telah ada dalam sejarah dan praktek kemasyarakatan nenek moyang bangsa Indonesia.

Perihal genuinitas demokrasi yang terdapat dalam lingkungan masyarakat di seluruh Indonesia itu, B.J. Haga dengan sangat teliti telah menyimpulkan dan menelaah bahan-bahan ini di tiap-tiap masyarakat adat yang dipelajarinya. Dalam penelitian ini sampailah ia pada kesimpulan sebagaimana pernah dikutip Abdurahman Wahid Indonesia benar-benar terdapat sejarah sejenis "demokrasi timur".¹⁰

Dalam kehidupan kemasyarakatan mereka ini berkelompok-kelompok yang biasanya disebut "kaum" atau "anang" (bugis) atau "marga" (batak) yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain oleh hubungan kekerabatan yang ketat. Secara perorangan warga kaum berkedudukan merdeka, wajib menghormati, malahan melindungi kemerdekaan warga lainnya. Tiap warga kaum dianggap

¹⁰. Abdurahman Wahid, *Agama dan Demokrasi*, Dian, Yogyakarta, 1994, hal. 201

mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Meskipun ada kepala kaum, tetapi posisinya tidak lantas diletakkan di atas hak warga lainnya. Meskipun tidak pernah terumuskan, tapi sifat-sifat ini telah menjadi dasar pokok dan tabiat kelangsungan hidup dalam masyarakat saat itu.

Unsur demokrasi dalam masyarakat ini tercermin dalam menempatkan kekuasaan tertinggi yang diserahkan kepada rapat adat (kumpulan). Sebagaimana dalam transformasi demokrasi kedua, maka demikian pula dalam tabiat masyarakat Indonesia tradisional, suatu keputusan itu ditetapkan oleh kepala kesatuan adat bersama dengan anggota yang memenuhi syarat kemampuan sebagai wakil. Maka dengan demikian pimpinan kepala adat ini mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah dalam semua anggota. Bahkan kalau saja warga merasa tidak puas dengan pimpinan kepala karena menyalahi hukum adat, maka dengan demikian diperbolehkan bagi warga untuk melepaskan hubungan dengan pimpinan kepala adat tersebut dan atau dapat menggabungkan diri dengan seorang pimpinan kepala adat lainnya.

Dengan demikian terbukti bahwa masyarakat Indonesia tradisional dikenal telah hidup berkelompok dengan menerapkan prinsip-prinsip demokratis. Hanya saja, keadaan ini mulai berubah ketika agama Hindu-Budha datang di nusantara, dimana telah diterapkan strata-kelas sosial dengan diprakarsai oleh pimpinan kerajaan. Gonjangan atas corak kehidupan yang demokratis dalam persekutuan masyarakat tradisional, akhirnya tertolong dengan kehadiran agama Islam. Dalam masyarakat terutama kerajaan, dengan Islam inilah segenap unsur kerakyatan atau demokrasi memperoleh pengembangan kembali. Unsur-unsur kerakyatan yang

utama seperti kesamaan derajat tiap-tiap individu serta kemerdekaan dibela dan dihormati oleh tiap-tiap warga lainnya sebagai hak dan kewajiban tiap warga persekutuan.

Adanya kenyataan semacam ini juga diperkuat Deliar Noer yang menyatakan bahwa Islam masuk nusantara justru merombak negara yang bersifat teokrasi, karena Islam bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Deliar menuturkan :

Para pendukung ide masuknya Islam dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia berpendapat bahwa ciri dasar dari agama Islam tidak memungkinkan negara bersifat teokrasi, oleh sebab itu Islam tidak mengakui sistem kependetaan. Negara Islam kata mereka, adalah sebuah negara yang melaksanakan ajaran Islam di tangan masyarakat untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat secara keseluruhan. Tetapi pendukung-pendukung ini tidak mempunyai perbedaan tafsiran tentang cara melaksanakan kekuasaan ditangannya lebih dahulu untuk melaksanakan ajaran-ajaran dasar tersebut.¹¹

Perkembangan kembali pada azas kerakyatan ini, juga didukung oleh adanya lingkungan kerajaan Islam nusantara yang sangat kondusif, karena dengan Islam sebagai agama resmi maka kehidupan masyarakat diliputi suasana kebebasan.

C. 2. Konsepsi Demokrasi dalam Masyarakat Indonesia

Adanya tabiat demokrasi nusantara semacam itu, adalah gambaran corak kehidupan masyarakat tradisional sebelum mengenal konsep "Bangsa" Indonesia. Konsep yang tersebut terakhir ini baru lahir pada awal abad kedua puluh, ketika timbul keinginan dari rakyat untuk mendirikan negara Indonesia yang saat itu masih dijajah Belanda. Dan secara resmi adalah dengan ditandai

¹¹ . Abdurrahman Wahid, *Op cit*, hal. 203

berdirinya Budi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Para tokohnya yang menonjol adalah mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan.

Oleh karena itu ketika muncul Sarekat Islam, maka kehadirannya saat itu dianggap tepat. Sarekat Islam semula bernama Sarekat Dagang Islam, yang semula bermotif "kerukunan dan tolong menolong satu sama lain antara sekalian kaum muslim", pada awal perkembangannya dibawah kepemimpinan Haji Umar Said Cokroaminoto, setelah mengadakan pertemuan di Surabaya (1913), menegaskan bahwa tujuan gerakan itu adalah membangunkan kebangsaan, mencari hak-hak kemanusiaan yang memang sudah tercetak oleh Tuhan, menjunjung derajat yang masih rendah, dan memperbaiki nasib yang masih jelek. Maka tidak mengherankan kalau akhirnya dalam waktu singkat, Sarikat Islam telah berkembang dengan cepatnya. Berbeda dengan Budi Oetomo yang membatasi keanggotaannya bagi priyayi Jawa dan Madura, Sarikat Islam terbuka untuk setiap orang Indonesia tanpa memandang latar belakang sosio-etnis mereka. Ekspansi Sarekat Islam tidak saja menembus sektor urban, tetapi juga masuk di masyarakat desa yang notabenenya adalah petani.

Dan sebagai puncak dari pernyataan identitas bangsa Indonesia terjadi pada tahun 1928 ketika tanggal 28 Oktober terjadi Sumpah Pemuda yang berikrar untuk bangsa, bertanah air, dan berbahasa satu, Indonesia. Dalam konsep bangsa Indonesia inilah dicakup suku bangsa-bangsa yang sebelumnya berjuang secara lokal dengan identitas bangsa yang masih terikat dengan suku atau wilayah masing-masing. Meski demikian, tiga contoh gerakan dari banyak gerakan zaman perjuangan ini masih belum berhasil merumuskan secara final tentang konsep

bangsa, sebab sesudah itu masih saja terlihat penggunaan istilah bangsa secara berbeda menurut ideologi atau asal etnis tertentu. Dikalangan muslim Indonesia, istilah Kebangsaan Muslim.

Betapapun, dapat diterima bahwa konsep bangsa Indonesia modern telah lahir dan terus menggema sejak lahirnya hari Kebangkitan Nasional. Karena itu kalau kita mau mengadakan studi tentang perkembangan demokrasi dapat dimulai pada situasi ini.

D. DEMOKRASI DALAM PANDANGAN ISLAM

✓ Sangat berlawanan dengan model hubungan agama dan demokrasi baik yang negatif-kontradiktif maupun yang netral, dalam Islam hubungan agama-demokrasi--keduanya sangat positif. Islam berpandangan bahwa agama baik secara teologis maupun sosiologis, sangat mendukung proses demokrasi.

Dalam Islam manusia itu di gambarkan sebagai makhluk yang merdeka, dan karena kemerdekaannya itulah manusia bisa menduduki tempat yang terhormat. Dalam banyak sekali ayat diserukan agar manusia menemukan esensi dirinya, memikirkan kedudukan dirinya sesuai dengan keberadaan manusia.¹² Sesungguhnya dalam konsepsi Islam posisi manusia itu sangat penting, begitu pentingnya posisi itu dapat dilihat dalam predikat yang diberikan Tuhan sebagai "Kholifah" Allah, sebagai wakil Tuhan dimuka bumi. Allah berfirman dalam Surat Albaqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: ٣٠)

¹². Sudi Putro, *Islam dan Modernitas*, Paramadina, Jakarta, 1998, hal. 28

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah dimuka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan Mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak Engkau ketahui".

Predikat Khalifah sebagaimana disebutkan dalam ayat diatas, memberikan gambaran kepada kita bahwa seolah-olah Tuhan mempercayakan kekuasaannya kepada manusia untuk mengatur dunia ini, sebuah tugas yang maha berat yang makhluk-makhluk lain enggan memikulnya. Konsepsi ini sebenarnya merupakan konsepsi yang sangat revolusioner jika diingat bahwa dalam konteks lahirnya Islam sekitar abad ketujuh dan kedelapan, dunia terutama dibelahan Barat, didominasi oleh pandangan filsafat Romawi dan Yunani serta pandangan Kristen yang melihat manusia secara muram dan pesimistik.

Dalam filsafat Yunani dan Romawi misalnya, manusia dipandang sebagai makhluk yang rendah, mitologi Yunani melihat manusia sebagai makhluk yang sama sekali tidak memiliki kecerdasan sehingga diperlukan seorang dewa untuk menuntun manusia berfikir. Lebih ngeri lagi, didalam filsafat Kristen manusia dilihat sebagai makhluk yang pada hakekatnya busuk, manusia digambarkan sebagai pendosa hakiki sejak lahir, sehingga diperlukan seorang penebus dosa. Dan penebus dosa itu tak lain adalah Tuhan sendiri. Jelaslah bahwa faham ini merupakan faham fatalistik.

Dengan datangnya Islam, faham-faham seperti itu dirombak secara keseluruhan. Oleh Islam, manusia yang dalam Mitologi Yunani digambarkan sebagai makhluk yang rendah dan dungu, dan yang oleh Kristen dipandang

sebagai pendosa azali, kemudian direkonstruksi sedemikian rupa sehingga memperoleh kedudukan yang sangat terhormat sebagai wakil Tuhan, derajat manusia diangkat sampai sedemikian tinggi hingga mencapai kedudukan yang sangat mulia. Penekanan pada kemuliaan manusia inilah sesungguhnya yang sangat revolusioner dari konsepsi Islam. Dalam konsepsi mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan, Islam justru mengajarkan pembebasan, bukan pengekangan. Menurut Hasan Hanafi, konsepsi Tauhid juga termasuk didalamnya pandangan dunia. Karena itu, menurutnya kita harus mengkaji konsep Tauhid dilihat dari bagaimana fungsi pandangan Tauhid untuk membangun umat Islam, dan konsep "Kiri Islam" dianggap sebagai salah satu jalan membebaskan manusia, dan mengembalikannya pada posisi sebagai wakil Tuhan yang memiliki derajat yang mulia.¹³

Islam tidak saja melahirkan konsepsinya tentang persamaan manusia dari satu tulisan filsafat utopia, tapi memang Islam membangun masyarakat berdasarkan konsep ini. Didalam Masyarakat berkeadilan, perbedaan ras dan suku bangsa memiliki basis persamaan yang sepenuhnya bagi semua pribadi. Semua perbedaan baik yang menyangkut suku bangsa, warna kulit, bahasa maupun nasionalitas dihapuskan. Tidak hanya itu saja, Islam pun membangun negara dunia berdasarkan ideologi yang serupa dan dapat dipraktekkan secara baik dan berhasil.

Hal diatas dapat dijelaskan bahwa umat Islam itu percaya kepada manusia dan kemanusiaan secara terbuka dan positif. Jadi disamping sebagai Muslim, kita

¹³. Hassan Hanafi, *Kiri Islam*, Mizan, Jakarta, 1993, hal. 67

juga harus sekaligus seorang humanis. Tapi ini tentu berbeda dengan barat yang umumnya mengidentikkan humanisme dengan Sekularisme (disana percaya kepada nilai-nilai kemanusiaan dapat mengandung arti tidak percaya kepada nilai-nilai keagamaan).

Dalam Islam menurut Nurcholis Madjid, humanisme masih dan harus tetap berada dibawah sinar semangat ketuhanan. Sikap ini jelas tercermin dalam sikap Islam ketika menghadapi pemikiran humanistik dari falsafah Yunani sebagaimana kita sebelumnya atau pemikiran kemanusiaan ala Kristen.

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan secara keseluruhan tentang hubungan agama-demokrasi ini adalah, meskipun Islam tidak secara sistematis mengajarkan praktek demokrasi, namun Islam memberi etos, spirit dan muatan doktrinal yang akan menjadi daya dorong bagi terwujudnya kehidupan yang demokratis. Jadi pada tataran ini agama tidak berbicara tentang sistem, melainkan pada muatan substansial dari spirit dan arah demokrasi seperti halnya doktrin yang menekankan pada prinsip demokrasi. Dengan logika yang demikian inilah Iqbal menyebut model demokrasi ini dengan istilah "demokrasi spiritual".¹⁴

Komarudin Hidayat membuat istilah lain yaitu Teo-Demokrasi, yang berarti suatu tatanan demokrasi yang mempertimbangkan nilai-nilai transendental. Kita juga bisa membuat logika sederhana untuk memberikan justifikasi kita padahal tersebut, bukankah agama Islam diwahyukan Tuhan adalah untuk membantu meningkatkan harkat dan martabat manusia, artinya paham Teo-demokrasi tetap bisa memberikan ruang gerak bagi otonomi manusia. Jadi Teos

¹⁴ . Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Mizan, Jakarta, 1993, hal. 49

yang berinkarnasi dalam tubuh lembaga keagamaan tidak lantas menindas penalaran maupun kebebasan manusia.

Dengan melihat potensi umat Islam dalam hubungannya dengan demokrasi yang sangat responsif dan berpandangan positif seperti inilah, yang nantinya penulis jadikan pijakan dalam membahas bab selanjutnya.